

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DISERTASI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	33
1.3 Tujuan Penelitian.....	33
1.4 Originalitas / Keaslian Penelitian	35
1.5 Manfaat Penelitian.....	39
1.6 Sistematika Penulisan.....	41
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	44
2.1 Landasan Teori	44
2.1.1 Teori Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>)	45
2.1.2 Teori Kepastian Hukum.....	49
2.1.3 Teori Keadilan	56
2.2 Landasan Konseptual	71
2.2.1 Pencabutan Hak Atas Tanah	71
2.2.2 Pengadaan Tanah	78
2.2.3 Pembebasan Tanah	90

2.2.3.1	Pengertian Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum	95
2.2.3.2	Sumber Dana Pengadaan Tanah	99
BAB III METODE PENELITIAN	102	
3.1	Metodologi Penelitian	102
3.2	Bentuk dan Pendekatan Penelitian	106
3.2.1	Bentuk Penelitian	106
3.2.2	Pendekatan Penelitian	108
3.3	Bahan dan Data Penelitian	108
3.4	Teknik Pengumpulan Bahan.....	112
3.4.1	Studi Kepustakaan	112
3.4.2	Studi Lapangan	113
3.5	Pengolahan Data	113
3.6	Teknik Analisa	113
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	116	
4.1	Peraturan mengenai Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tower Transmisi PT PLN (PERSERO)	116
4.1.1	Sejarah Hukum Pertanahan.....	117
4.1.2	Politik Hukum Pertanahan	124
4.1.2.1	Landasan Konstitusional Politik Hukum Pertanahan.....	124
4.1.2.1.1	Politik Hukum Pertanahan Kolonial.....	143
4.1.3	Reformasi Hukum Pertanahan di Indonesia	144

4.1.3.1	Hukum Tanah Sebagai Suatu Sistem.....	148
4.1.4	Pengaturan Hukum Penguasaan Atas Tanah	150
4.1.4.1	Prinsip-Prinsip Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960	151
4.1.4.2	Perubahan Hukum Tanah.....	161
4.1.4.3	Proses terjadinya Hak Pengelolaan.....	173
4.1.4.4	Berdasarkan penetapan pemerintah	175
4.1.4.5	Landasan Yuridis Hak Pengelolaan	177
4.1.4.6	Hak Pengelolaan	180
4.1.4.7	Penitipan Uang Pemberian Ganti Kerugian.....	182
4.1.4.8	Hukum Tanah Nasional	183
4.1.4.9	Pendaftaran Tanah	185
4.1.4.10	Pendaftaran Hak Atas Tanah	186
4.1.4.11	Tujuan Pendaftaran Hak Atas Tanah	189
4.1.4.12	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Hak Atas Tanah	192
4.1.4.13	Sistem Pendaftaran Hak Atas Tanah.....	194
4.1.4.14	Asas dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah.....	196
4.1.5	Pengertian dan Klasifikasi Kepentingan Umum.....	199
4.1.6	Prinsip-Prinsip Pengaturan Pembebasan Tanah	202
4.1.7	Rencana Umum Tata Ruang Tata Wilayah dan Kabupaten/Kota	204
4.1.7.1	Pemanfaatan Tanah Yang Normatif	212

4.1.7.2	Pemanfaatan Tanah Yang Non Normatif.....	215
4.1.7.3	Hubungan Pengadaan Tanah dengan Pembangunan.....	216
4.1.7.3.1	Perencanaan Pengadaan Tanah.....	217
4.1.7.3.2	Persiapan Pengadaan Tanah	218
4.1.7.4	Musyawarah Ganti Rugi Dan Konsultasi Publik	219
4.1.7.5	Pengadministrasian Hasil Pembebasan Dan Pencabutan Hak Atas Tanah	225
4.1.7.5.1	Pendekatan sistem pembebasan tanah	225
4.1.7.6	Kajian Yuridis	227
4.1.7.7	Kajian Sosiologis	229
4.1.8	Asas Pemisahan Horizontal dalam Hukum Agraria	230
4.2	Implementasi Pengaturan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tower Transmisi PT PLN (PERSERO) di Indonesia.....	232
4.2.1	Implementasi Peraturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	233
4.2.1.1	Penilaian Ganti Kerugian.....	236
4.2.1.2	Pemberian Ganti Kerugian.....	239
4.2.1.3	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	243
4.2.1.4	Sumber Pendanaan.....	244
4.2.2	Kasus-Kasus Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	246

4.2.2.1	Kasus Pemilik Tanah Tidak Menerima Nilai Ganti Kerugian.....	247
4.2.2.2	Pemilik Tanah yang Meminta Seluruh Tanahnya Dibebaskan.....	247
4.2.2.3	Pemilik Tanah yang Tidak Diketahui Keberadaannya.....	247
4.2.2.4	Merubah Jalur yang Telah Ditetapkan	248
4.2.2.5	Jalur Transmisi Melalui Hutan.....	248
4.2.2.6	Uang Kompensasi Untuk Kepentingan Masyarakat Setempat	248
4.2.3	Kasus Konsinyasi dan Pencabutan Hak Atas Tanah	248
4.2.4	Kasus Konsinyasi dan Pencabutan Hak Atas Tanah berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pdt.P.consig/2020/PNBil	250
4.2.5	Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	254
4.2.5.1	Proses Perencanaan	254
4.2.5.2	Tahap Persiapan	256
4.2.5.3	Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah	259
4.2.5.4	Penilaian Ganti Kerugian	261
4.2.5.5	Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian.....	262
4.2.5.6	Besaran Ganti Rugi	264
4.2.5.7	Pengaruh Pihak Lainnya	265

4.2.6	Faktor-faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.....	267
4.2.7	Pendapat Para Ahli.....	272
4.2.8	Temuan Hasil Penelitian.....	278
4.2.8.1	Fungsi Sosial Hak Atas Tanah.....	284
4.2.8.2	Tanah dalam Kondisi Perubahan Sosial dan Pergeseran Sosial	291
4.3	Pengaturan mengenai Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tower Transmisi PT PLN (PERSEIRO) yang Menjamin Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Indonesia	296
4.3.1	Kelemahan Norma Pengaturan dan Kebutuhan Penguatan Kepastian Hukum	299
4.3.1.1	Masalah Kelemahan Norma Pengaturan.....	302
4.3.1.2	Kebutuhan Penguatan Kepastian Hukum	302
4.3.2	Dampak Penguatan Aspek Kepastian Hukum Terhadap Nilai Keadilan	303
4.3.3	Reformasi Regulasi di Bidang Pertanahan	304
4.3.3.1	Penegasan Pengertian Kepentingan Umum.....	305
4.3.3.2	Pengaturan Teknis Pembebasan Tanah.....	307
4.3.4	Penguatan Pengaturan di Bidang RUTR	313
4.3.4.1	Kepastian Hukum RUTR.....	315
4.3.4.2	Larangan Perubahan RUTR.....	316
4.3.4.3	Penjabaran RUTR	317

4.3.5 Pengaturan Ganti Rugi Dalam Pembebasan Tanah Yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan.....	318
4.3.5.1 Prinsip-Prinsip Penentuan Besaran Ganti Rugi ...	319
4.3.5.2 Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi	320
4.3.6 Pengawasan Pelaksanaan Pembebasan Tanah	328
BAB V PENUTUP.....	330
5.1 Kesimpulan.....	330
5.2 Saran	335
DAFTAR SINGKATAN.....	cccxxxix
DAFTAR PUSTAKA	cccxliv
LAMPIRAN.....	cccliv